

BAB IV

OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

4.1.1 *CROSS-STRAIT RELATIONS*

Hubungan Lintas Selat (Tiongkok:) atau hubungan Taiwan-Tiongkok, hubungan Daratan-Taiwan merujuk pada hubungan antara dua entitas politik berikut, yang dipisahkan oleh Selat Taiwan di Samudra Pasifik barat (https://www.taiwan.gov.tw/content_3.php / di akses 14 januari 2019):

- a. Republik Rakyat Tiongkok (RRT), umumnya dikenal sebagai Tiongkok, dan
- b. Republik Tiongkok (RT), umumnya dikenal sebagai Taiwan.

Hubungan mereka kompleks dan kontroversial karena perselisihan mengenai status politik Taiwan setelah administrasi. Taiwan dipindahkan dari Jepang pada akhir Perang Dunia II pada 1945 dan perpecahan Tiongkok selanjutnya menjadi dua di atas pada tahun 1949 sebagai akibat dari perang saudara, dan bergantung pada pertanyaan kunci apakah kedua entitas tersebut adalah dua negara yang terpisah (baik sebagai "Taiwan" dan "Tiongkok" atau Dua Tiongkok: "Republik Tiongkok" dan "Republik Rakyat Tiongkok"), atau dua "bagian" "atau" wilayah "dari negara yang sama (yaitu "Satu Tiongkok"), dan juga apakah pemindahan Taiwan ke Republik Tiongkok itu sah secara hukum (<https://www.thechinastory.org/yearbooks/yearbook-2012/cross-straits-relations/> di akses 11 januari 2019).

Pada tahun 1949, dengan Perang Sipil Tiongkok yang berpihak pada Partai Komunis Tiongkok (CPC), pemerintah Republik Tiongkok (ROC) yang dipimpin oleh Kuomintang (KMT) mundur ke Taiwan dan mendirikan ibu kota sementara di Taipei, sementara CPC memproklamkan pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok (RRC) di Beijing (https://www.taiwan.gov.tw/content_6.php / di akses 10 januari 2019).

Sejak itu, hubungan antara pemerintah di Beijing dan Taipei telah ditandai oleh kontak yang terbatas, ketegangan, dan ketidakstabilan, karena fakta bahwa Perang Sipil hanya berhenti tanpa penandatanganan perjanjian damai secara formal dan kedua belah pihak secara teknis masih dalam keadaan perang. Pada tahun-tahun awal, konflik militer berlanjut, sementara secara diplomatis kedua pemerintah bersaing untuk menjadi "pemerintah Tiongkok yang sah". Baru-baru ini, pertanyaan seputar status politik dan hukum Taiwan telah berfokus pada prospek alternatif penyatuan politik dengan Tiongkok daratan atau kemerdekaan penuh Taiwan. Republik Rakyat tetap memusuhi deklarasi kemerdekaan resmi dan mempertahankan klaimnya atas Taiwan. Pada saat yang sama, pertukaran non-pemerintah dan semi-pemerintah antara kedua pihak telah meningkat. Sejak 2008, negosiasi mulai memulihkan "tiga mata rantai" (transportasi, perdagangan, dan komunikasi) antara kedua belah pihak, terputus sejak 1949. Pembicaraan partai-ke-pihak antara BPK dan KMT telah dilanjutkan dan negosiasi semi-resmi melalui organisasi yang mewakili kepentingan pemerintah masing-masing dijadwalkan. (<https://www.thechinastory.org/yearbooks/yearbook-2012/cross-straits-relations/> di akses 11 januari 2019).

Ungkapan bahasa Inggris "*Cross-Strait Relations*" telah digunakan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan oleh banyak pengamat sehingga hubungan tersebut tidak akan disebut sebagai "(hubungan China-Taiwan)" atau "hubungan RRT-RT", karena perselisihan tentang sifat hubungan mereka dan nama "benar" masing-masing pihak. Juga tidak ada frase bahasa Tiongkok yang umum digunakan yang setara dengan dua frasa terakhir, meskipun hubungan Daratan-Taiwan dan Tiongkok-Taiwan kadang-kadang digunakan.

Dari pendirian RRC dan Republik Tiongkok (ROC) di Taiwan pada tahun 1949, hubungan lintas-Selat secara kasar dapat dibagi menjadi empat fase: 1949 - awal 1970-an; awal 1970-an - pertengahan 1980-an; pertengahan 1980-an - pertengahan 1990-an; pertengahan 1990-an.

4.1.1.1 Kronologi Hubungan Lintas Selat Fase 1 (1949 - awal 1970-an)

Fase pertama, yang dimulai dengan proklamasi kedua republik setiap sisi Selat, ditandai oleh mode konfrontasi militer. Banyak yang menunjukkan fakta bahwa Daratan akan melancarkan serangan militer terhadap Taiwan seandainya bukan karena pecahnya Perang Korea. Perang ini tidak hanya menuntut serangan kuat oleh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di semenanjung. Selain itu, serangan militer terhadap Taiwan dicegah oleh blokade Amerika dari Selat Taiwan selama perang. Setelah perang, AS dan Taiwan menandatangani perjanjian pertahanan bersama. Namun demikian, keduanya RRC dan ROC bertujuan untuk secara militer menguasai pihak lain dan konflik militer keduanya yang relatif kecil meletus selama 1950-an. Setelah A.S. mengangkat blokade di atas Selat Taiwan,

yang diberlakukan untuk mencegah serangan militer dari Daratan, pemimpin ROC Chiang Kai-shek memindahkan sejumlah besar pasukan ke pulau Jinmen (Quemoy) dan Mazu pada tahun 1954, beberapa kilometer dari daratan Tiongkok. RRC membalas dengan serangan artileri berat di pulau-pulau. Namun, pertempuran itu terkendali. pulau-pulau lepas pantai dan tidak mengancam integritas pertempuran entitas politik. Memang, banyak menunjuk pada fakta RRC yang ingin menyelesaikan masalah dengan cara damai pada saat itu. Pada tahun 1958, setelah meluncurkan Great Leap Forward, RRC mulai merevisi kebijakan luar negeri "soft-line" -nya pada lima prinsip hidup berdampingan secara damai - yang telah diperkenalkan di Indonesia 1954. Sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan luar negeri ini, pada bulan Agustus tahun yang sama, RRC melancarkan serangan artileri kedua di pulau-pulau itu (<https://www.thechinastory.org/yearbooks/yearbook-2012/cross-straits-relations/> di akses 11 januari 2019)..

Karena kekuatan militer adalah strategi utama kedua belah pihak, sulit untuk mengidentifikasi langkah-langkah canggih pencegahan dan manajemen konflik, terutama yang tidak damai. Contoh lain adalah garis tengah virtual di Selat, yang mulai menjadi dihormati oleh pihak-pihak sejak 1950-an dan seterusnya. Meski kurang formal perjanjian, Taiwan, RRC dan AS semua menahan diri untuk tidak melewati ini garis, yang kemudian menjadi garis kontrol aktual antara dua entitas. Selama waktu ini, ketiga aktor memiliki banyak peluang untuk mengubah batas kontrol, tetapi demi tidak merusak hubungan sepenuhnya, peluang ini tidak pernah ditindaklanjuti.

4.1.1.2 Kronologi Hubungan Lintas Selat Fase 2

Selama fase kedua hubungan lintas-Selat, fokus bergeser dari militer ke politik sebagai strategi utama untuk memenangkan pihak lain. Pada 1970-an, setelah pembentukan hubungan diplomatik dengan AS, dan AS memberikan pengakuan internasional di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tiongkok mengubah Kebijakan Taiwan dari pembebasan bersenjata hingga damai. Status perubahan RRT dan dikeluarkannya RT dari AS adalah sinyal yang jelas bahwa masyarakat internasional menganggap pemerintah di Beijing sebagai perwakilan sah dari Tiongkok. Dipicu oleh kepercayaan baru status dalam komunitas internasional, RRT siap berkomunikasi dengan RT. Pada 1979, RRT menyerukan perundingan terbuka dengan Kuomintang (KMT) dan meluncurkan serangkaian proposal, termasuk pendirian "tiga tautan" (perdagangan, layanan pos dan transportasi) dan "empat pertukaran" (akademik, budaya, olahraga, sains dan teknologi) (<https://www.thechinastory.org/yearbooks/yearbook-2012/cross-straits-relations/> di akses 11 januari 2019)..

Disebabkan oleh kehilangan status internasional dan rasa kerentanan yang baru diperoleh, ROC tidak siap untuk kontak lebih lanjut dengan RRC. Dengan demikian, ROC merespons dengan kebijakan "*Three Nos*" (tidak ada kontak, tidak ada negosiasi, dan tidak ada kompromi). Meskipun ROC menentang normalisasi dalam hubungan dengan Daratan, ia meninggalkan doktrin militer ofensif mendukung strategi defensif yang menekankan mobilisasi, kesiapan dan modernisasi militer dalam upaya menahan kemunculan militer kekuatan RRC. Meski begitu, pengambilalihan militer Daratan tidak sepenuhnya dikesampingkan.

4.1.1.3 Kronologi Hubungan Lintas Selat Fase 3

Fase ketiga, dari pertengahan 1980-an hingga pertengahan 1990-an kadang-kadang digambarkan sebagai periode bulan madu dalam hubungan lintas-Selat. Meskipun tidak ada perjanjian perdamaian formal ditandatangani, langkah-langkah yang sadar diambil untuk meningkatkan stabilitas lintas negara Selat dan memfasilitasi untuk pertukaran orang dan bisnis. Selama periode ini, perdagangan lintas selat dan investasi ROC di Daratan tumbuh secara substansial dan jika perdagangan segitiga melalui Hong Kong dimasukkan, angka menunjukkan bahwa ROC adalah investor terbesar di RRC. Sebagai reaksi terhadap realitas yang berubah dari peningkatan pertukaran lintas-Selat antar manusia, ROC mencabut larangan kunjungan Daratan pada tahun 1987. Untuk mendorong lebih lanjut Bisnis Taiwan di Daratan, RRC mendirikan dua zona investasi untuk perusahaan Taiwan di Fujian pada tahun 1989. Beberapa tahun kemudian, National Kongres Rakyat mengesahkan undang-undang yang melindungi investasi Taiwan Daratan. Ini adalah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diterapkan untuk meningkatkan hubungan antara kedua belah pihak. Pada awal 1990-an, Straits Exchange Foundation (SEF) di Jakarta Taiwan dan Asosiasi untuk Hubungan Lintas Selat Taiwan (ARAT) di Daratan didirikan untuk menangani hubungan lintas-Selat. Ini baru saluran komunikasi digunakan untuk pembicaraan semi-resmi reguler masalah fungsional.

Dengan cepat menjadi saluran utama, di luar bisnis, untuk komunikasi lintas-Selat di bidang sipil. Sehubungan dengan urusan militer, perpindahan dari postur ofensif ke defensif. Taiwan menolak untuk memulihkan Daratan kekuatan

militer dan menyatakan hanya fokus pada pertahanan dalam negeri, postur lebih sesuai dengan kemampuan aktual militer ROC. Pada 1991, Taiwan secara sepihak menyatakan berakhirnya permusuhan di Selat. Dengan demikian, meskipun secara tidak langsung, mengakui legitimasi aturan PKC atas PKC daratan. Meskipun langkah ini diterima secara positif di sisi lain Selat, RRC masih tidak mengakui keberadaan ROC (https://www.taiwan.gov.tw/content_6.php / di akses pada 10 Januari 2019).

Kemudian pada tahun yang sama, Eksekutif Taiwan juga mengadopsi Pedoman untuk Unifikasi Nasional, bisa dibilang tindakan membangun kepercayaan sepihak. Ini berkontribusi pada peningkatan hubungan keseluruhan antara Taiwan dan Tiongkok terlepas dari kegagalan RRT untuk merespons langkah-langkah ini secara memadai. Selain itu, kebijakan RRT tetap defensif, meskipun kapasitas dan jangkauan Angkatan Laut PLA meningkat selama periode ini. Dalam hal tindakan manajemen konflik, telah dilaporkan bahwa keduanya Angkatan Laut mempraktikkan pengendalian diri ketika mereka bertemu di Selat Taiwan. Demikian pula, Seiring berjalannya waktu, pertemuan oleh pasukan udara dari masing-masing pihak berkembang menjadi kode etik informal. Selain itu, angkatan laut dan udara Taiwan adalah dilaporkan memberi perintah untuk tidak menembak lebih dulu jika terjadi bentrokan dengan mereka Rekan-rekan Tiongkok. Selanjutnya, terima kasih untuk pengembangan lebih lanjut teknologi canggih, penerbangan pengawasan Taiwan tidak lagi diperlukan dan garis tengah virtual terus diamati. Ini CBM militer, bagaimanapun, beristirahat dengan alasan rapuh dan bekerja dengan baik selama itu karena di sana tidak ada insiden besar.

Selain itu, selama periode ini, pilot dan kapten di kedua sisi masih memiliki pengalaman tempur yang nyata, yang membuat mereka lebih sadar akan risiko yang terlibat daripada generasi staf militer saat ini. Dengan demikian, praktik pengekanan diri yang rapuh dan tidak mengikat ini bahkan lebih sedikit andal hari ini dan risiko salah penilaian meningkat.

4.1.1.4 Kronologi Hubungan Lintas Selat Fase 4

Perkembangan Politik Selama fase keempat, dari pertengahan 1990-an hingga saat ini, hubungan lintas Selat mulai memburuk. Pada pertengahan 1990-an, Taiwan mulai melangkah upaya untuk memecahkan isolasi diplomatiknya. Beijing, pada gilirannya, menafsirkan apa pun yang bergerak menuju pengakuan internasional atas nama Taiwan sebagai langkah menuju kemerdekaan de jure dan pemisahan ibu pertiwi. Sebagai tanggapan untuk kunjungan Presiden Taiwan Lee Teng-hui ke Amerika Serikat pada tahun 1995, Beijing menghentikan semua pembicaraan antara SEF dan ARAT. Dalam hubungannya dengan ini, dan dalam menghadapi pemilihan Taiwan yang akan datang, RRC meluncurkan serangkaian latihan militer di Selat Taiwan pada tahun 1995 dan 1996 dengan tujuan mengintimidasi Taiwan dan melanjutkan jalan menuju kemerdekaan. Ketegangan mencapai puncaknya pada Maret 1996 ketika PLA menembakkan empat rudal di dekat garis pantai Taiwan, yang memicu serangan serius, krisis yang menyebabkan keterlibatan militer A.S (https://www.thechinastory.org/yearbooks/yearbook-2012/cross-straits-relations/ di akses 11 januari 2019). Selama ini, itu juga dilaporkan bahwa Angkatan Udara

PLA terbang melintasi garis tengah virtual beberapa kali (https://www.taiwan.gov.tw/content_6.php / di akses pada 10 Januari 2019).

Militer Taiwan, bagaimanapun, diperintahkan untuk berlatih menahan diri meskipun risiko untuk tindakan yang tidak direncanakan telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 1998, ketika hubungan lintas-Selat mulai stabil, menyusul de-eskalasi upaya kedua belah pihak, pembicaraan antara SEF dan ARAT dilanjutkan. Namun, pemulihan hubungan hanya berlangsung sampai tahun 1999 (https://www.taiwan.gov.tw/content_6.php / di akses pada 10 Januari 2019).

Setelah ini, pembicaraan ditunda lagi dan serangkaian latihan militer baru diluncurkan. Keberhasilan pemilihan Partai Progresif Demokratik (DPP) pada tahun 2000 dan pelantikan Chen Shuibian, seorang pendukung kemerdekaan yang blak-blakan, tidak melayani untuk meningkatkan hubungan politik yang sangat dingin di seberang Selat. Chen Shui-bian terpilih kembali pada 2004 setelah kampanye pemilihan melibatkan rencana referendum Taiwan dan penulisan ulang konstitusi Taiwan. Setelah Chen terpilih kembali, ia mengurangi retorikanya dan beberapa peningkatan dalam hubungan lintas-Selat bisa diperhatikan. Namun, ini tidak berfungsi untuk mengubah ketidakpercayaan terhadap Chen di Tiongkok Daratan atau ketakutan dia mendeklarasikan kemerdekaan. Selain itu, Daratan juga sangat sadar ketergantungan Chen pada kelompok-kelompok pro-kemerdekaan yang lebih radikal di Taiwan dan Taiwan pengaruh wakil presiden Chen Annette Lu, yang vokal advokat kemerdekaan. Segera beredar desas-desus bahwa Taiwan akan melakukannya membatalkan dewan unifikasi dan mungkin

juga mendeklarasikan kemerdekaan, yang menyebabkan kekhawatiran besar di Daratan. Akibatnya, pada Maret 2005, Kongres Rakyat Nasional Daratan mengadopsi UU Anti-Secession. Undang-undang ini menegaskan prinsip "Satu-Tiongkok" sebagai dasar penyatuan kembali tetapi juga membuat proposal tertentu untuk ditingkatkan pertukaran dan negosiasi lintas-selat. Undang-undang itu juga menetapkan bahwa Tiongkok "akan menggunakan cara yang tidak damai dan tindakan lain yang diperlukan" jika Pasukan separatis harus bertindak untuk menyebabkan pemisahan Taiwan dari Tiongkok, jika sukseksi semacam itu harus terjadi atau jika semua kemungkinan untuk perdamaian reunifikasi harus benar-benar habis. Tak perlu dikatakan, hukum bertemu dengan protes berat di Taiwan. Pada Februari 2006, kepemimpinan Taiwan mengambil keputusan untuk menghapus Dewan Unifikasi Nasional, meskipun Chen Shui-bian berjanji untuk tidak melakukannya dalam pidato pelantikannya pada tahun 2000. Meskipun dewan selama 16 tahun lebih atau semakin tidak berfungsi, penghapusan ditafsirkan sebagai langkah lain menuju kemerdekaan. Menurut kepemimpinan Tiongkok, Beijing adalah akibatnya terpaksa mengambil sikap lebih keras berhadapan dengan Taipei (https://www.taiwan.gov.tw/content_6.php / diakses pada 10 Januari 2019).

4.1.2 HUBUNGAN TIONGKOK-TAIWAN

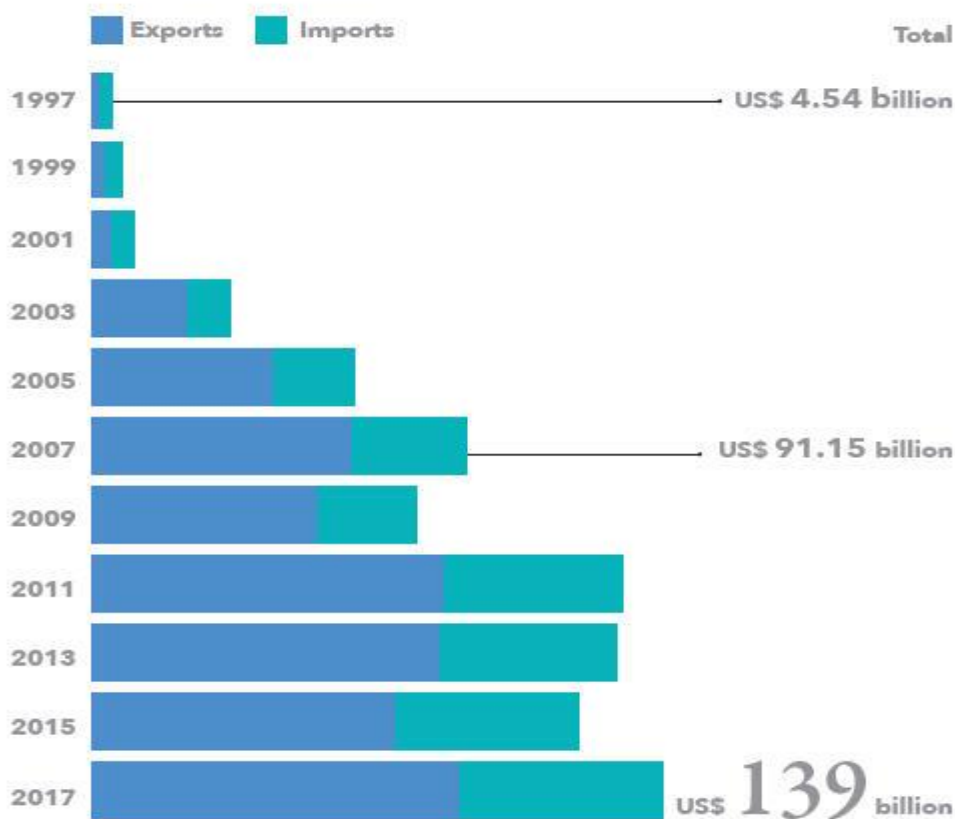
Sejak pemerintah pindah ke Taiwan pada tahun 1949, telah menjalankan yurisdiksi atas Taiwan, Kepulauan Penghu, Kepulauan Kinmen, Kepulauan Matsu dan sejumlah pulau kecil, sementara Tiongkok berada di bawah kendali

pemerintah di Beijing. Dimulai dengan percepatan demokratisasi Taiwan pada akhir 1980-an, banyak pembatasan mengenai pertukaran sipil dengan Tiongkok telah dicabut., Taiwan adalah salah satu investor terbesar di Tiongkok. Pada 2017, nilai perdagangan bilateral lintas selat adalah US \$ 139 miliar. Pada tahun itu, para pelancong dari Tiongkok melakukan hampir 2,7 juta kunjungan ke Taiwan, naik dari 329.204 pada 2008.

Pada Juni 2008, pembicaraan yang dilembagakan antara Yayasan Pertukaran Selat Semi-resmi Taiwan dan Asosiasi Tiongkok untuk Hubungan Lintas Selat Taiwan dilanjutkan setelah jeda 10 tahun. Pada Agustus 2015, 11 putaran negosiasi telah diadakan secara bergantian di kedua sisi Selat Taiwan, menghasilkan 23 perjanjian formal dan dua konsensus. Yang paling penting di antara perjanjian tersebut adalah Perjanjian Kerangka Kerja Sama Ekonomi Lintas-Selat (ECFA) yang berakhir pada Juni 2010, yang bertujuan melembagakan perdagangan dan hubungan ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok.

Grafik 4.1
Perdagangan Cross-Strait

CROSS-STRAIT TRADE



Source: Customs Administration, Ministry of Finance

Sumber: <https://www.taiwan.gov.tw/images/content/6-2.jpg>

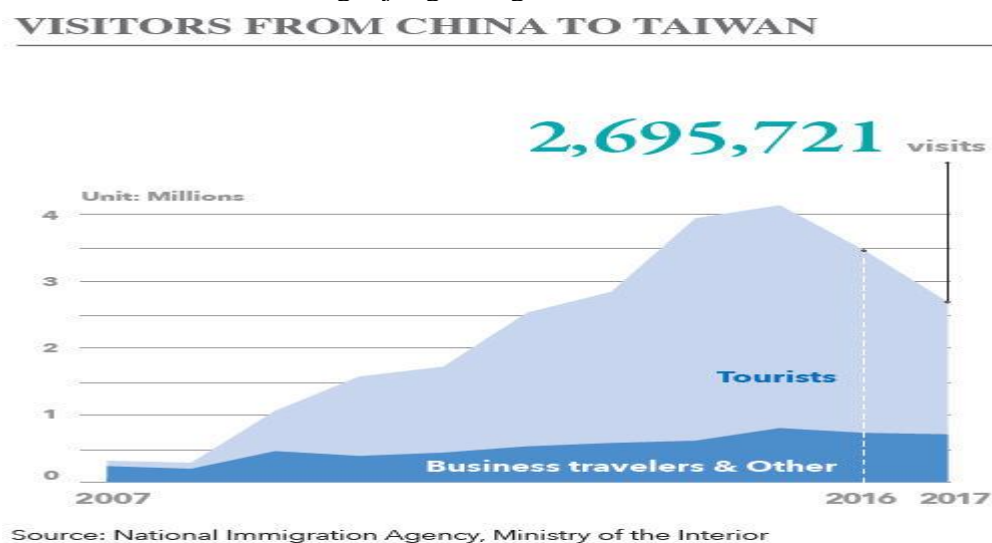
Pada tahun 1992, dua institusi yang mewakili setiap sisi selat, SEF dan ARAT, melalui komunikasi dan negosiasi, tiba di berbagai pengakuan dan pengertian bersama. Ini dilakukan dalam semangat saling pengertian dan sikap politis mencari titik temu sambil mengesampingkan perbedaan. Pemerintah menghormati fakta sejarah ini. Sejak 1992, lebih dari 20 tahun interaksi dan negosiasi lintas selat telah memungkinkan dan mengakumulasi hasil yang harus dihargai dan dipertahankan oleh kedua belah pihak secara kolektif; dan didasarkan

pada kenyataan dan fondasi politik yang ada sehingga pengembangan hubungan lintas selat yang stabil dan damai harus terus dipromosikan.

Pendekatan yang Konsisten Pemerintah taiwan akan terus membahas hubungan lintas selat berdasarkan fakta historis dari perundingan 1992, Konstitusi ROC, Undang-Undang yang Mengatur Hubungan Antara Rakyat Daerah Taiwan dan Wilayah Daratan, dan kehendak rakyat (<https://www.taiwan.gov.tw/> // di akses 21 April 2019).

Selain itu, pemerintah menyerukan kepada otoritas Tiongkok untuk menghadapi kenyataan bahwa ROC ada dan bahwa rakyat Taiwan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap sistem demokrasi. Kedua sisi selat harus duduk dan berbicara sesegera mungkin. Apa pun bisa dimasukkan untuk diskusi, asalkan kondusif bagi pengembangan perdamaian lintas selat dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan dan fleksibilitas, serta sikap tenang, dapat memajukan hadiah yang terbagi menuju masa depan yang saling menguntungkan

Grafik 4.2
Pengunjung Tiongkok ke Taiwan



4.1.2.1 SEJARAH PULAU ILHA FORMOSA

Taiwan merupakan sebuah pulau yang dulu dikenal dengan nama *Ilha Formosa*, berasal dari bahasa Portugis yang artinya “pulau yang indah”. Secara geografis Taiwan terletak di Asia Timur yang bersebelahan dengan Pantai Tiongkok Daratan, sebelah utara berbatasan dengan Jepang, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Tiongkok, dan sebelah selatan dekat dengan Filipina. Pada bagian timur Taiwan terhubung langsung dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Luzon, di sebelah barat oleh Selat Taiwan (http://multilingual.mofa.gov.tw/web/web_UTF-8/MOFA/glance2016/Indonesian.pdf / di akses 20 januari 2019).

Sebelah utara Laut Tiongkok Timur. Memiliki luas sekitar 36.000 km persegi dan beribukota di Taipei.⁴⁹ Jika dilihat dari letak geografisnya, Taiwan memiliki posisi yang sangat strategis yang berdekatan dengan Samudra Pasifik, Jepang, dan Asia Tenggara.⁵⁰ Sebelum Taiwan mengklaim sebagai sebuah negara, Taiwan pernah merasakan berbagai pengalaman penjajahan oleh beberapa negara. Pada tahun 1500 Taiwan ditemukan oleh pelaut asal Portugis yang kemudian dijuluki dengan nama *Formosa*. Kemudian Belanda datang ke Taiwan pada tahun 1624 dan mendirikan pangkalan dagang *Dutch East India*. Tetapi, penjajah Spanyol pada tahun 1626 berhasil menguasai wilayah utara Taiwan dengan mendirikan pangkalan, namun berhasil direbut oleh Belanda pada tahun 1642 (https://www.researchgate.net/figure/260024694_fig1_Figure-1-a-The-geography-of-Taiwan-and-b-meteorological-stations-points-elevation di akses 20 januari 2019).

Pada tahun 1662-1683 datang seorang loyalis dari dinasti Ming yang bernama Cheng Cheng Kung berhasil membebaskan Taiwan dari tangan Belanda dan mendirikan kerajaan Tungning. Tidak lama kemudian, pada tahun 1644 dinasti Qing atau dikenal juga dinasti Manchuria yang berasal dari daratan Tiongkok berusaha memperluas kekuasaannya sampai ke pulau Taiwan. Serangan terus dilakukan hingga Taiwan berhasil direbut dari kerajaan Tungning di bawah pimpinan Laksamana Shi Lang. Akhirnya, pada tahun 1885 Taiwan dinyatakan sebagai provinsi kekaisaran dinasti Qing.⁵³ Pada saat kekuasaan berada di tangan kekaisaran Qing, pulau Formosa diubah menjadi Taiwan.⁵⁴ Nama Taiwan sendiri berasal dari bahasa Tiongkok “Tai” dan “wan” yang maknanya adalah tanah datar yang landai yang berada pada suatu teluk (<https://www.taiwan.gov.tw/> / di akses 21 April 2019).

Pada tahun 1894 pasukan Jepang datang untuk memperluas wilayahnya, yang menyebabkan pecahnya Perang Sino-Jepang I antara dinasti Qing dan Jepang.⁵⁶ Namun dinasti Qing mengalami kekalahan yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Shiminoseki pada tahun 1895. Dimana dinasti Qing menyerahkan kedaulatan atas Taiwan kepada Jepang Taiwan berada di bawah kekuasaan protektorat Jepang cukup lama yakni hingga kekalahan Jepang pada Perang Dunia II pada tahun 1945.⁵⁸ Akibat kekalahannya, Jepang harus memberikan sebagian wilayah jajahnya kepada sekutu, yaitu Taiwan kepada Tiongkok (http://multilingual.mofa.gov.tw/web/web_UTF-8/MOFA/glance2016/Indonesian.pdf / di akses 20 Januari 2019) .

4.1.2.2 PISAHNYA TAIWAN DARI TIONGKOK HINGGA BERDIRINYA TAIWAN

Revolusi nasional di Tiongkok pecah 1911 yang bertujuan untuk menggulingkan Dinasti Qing yang menganut sistem feodal dan monarki, dimana pemerintahan bersifat turun-temurun. Selama pemerintahan dinasti Qing, kondisi rakyat Tiongkok sangat menderita akibat penindasan oleh kaum penguasa. Hal tersebut yang kemudian mendorong gerakan perubahan terutama bagi kalangan pelajar di Tiongkok. Sun Yat Sen adalah seorang intelektual dan revolusioner yang berhasil memimpin Revolusi Tiongkok 1911, dan yang kemudian bercita-cita ingin menasionalisasikan atau melakukan demokratisasi di Tiongkok berdasarkan asas San Min Chu. Akibat keberhasilan revolusi 1911, berdirilah Republik Tiongkok pada 1 Januari 1912 yang dipimpin oleh Sun Yat Sen. Namun, kursikepemimpinan tidak berlangsung lama karena Sun Yat Sen digantikan oleh Yuan Shih Kai, seorang *warlord* atau panglima perang yang sangat berpengaruh. Sementara Sun Yat Sen mengundurkan diri ke Kanton dan mendirikan Partai Nasionalis *Koumintang* pada tahun 1912 (<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/63534/DENI%20ADI%20WIJAYA.pdf;sequence=1> di akses 21 januari 2019).

Revolusi tahap dua kembali pecah pada tahun 1928, pasca meninggalnya Yuan Shih Kai. Hal ini disebabkan oleh peperangan yang terjadi diantara para *warlord* untuk saling berebut kekuasaan khususnya di bagian utara Tiongkok, karena ketiadaan seorang panglima yang diakui sebagai pemimpin. Sedangkan di wilayah Tiongkok bagian selatan, Sun Yat Sen diangkat sebagai kepala

pergerakan republik dan diangkat kembali menjadi presiden di Kanton pada 21 Januari 1921. Pada masa transisi kekuasaan inilah yang menimbulkan masuknya paham komunis. Karena untuk mencapai cita-citanya, Sun Yat Sen melakukan reorganisir partainya pada tahun 1923 dengan Rusia sebagai partnernya, yang waktu itu Amerika Serikat dan Inggris dalam Konferensi Washington menolak reorganisasi Sun Yat Sen dengan alasan lebih ingin menjalin hubungan dagang.

Sehingga, hal tersebut memudahkan Rusia untuk menyebarkan paham komunisnya. Hal ini demikian, karena pasca kemenangan Partai Komunis menggulingkan Kaisar Tsar II dalam Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Rusia berencana untuk mendirikan cabang Komunis Internasional yang mengatur pendirian Partai Komunis di Tiongkok.

Dalam hal ini Sun Yat Sen ingin pemerintahan Tiongkok dimonopoli oleh satu partai yakni KMT, yang mana kemudian Sun Yat Sen mencontoh program pelaksanaan birokrasi Rusia. Oleh karena itu, Sun Yat Sen menerima kaum komunis dalam partai KMT karena Ia yakin bahwa komunis Rusia tidak dapat hidup di Tiongkok yang kondisinya berlainan. Pada 1 Juli 1921, terjalin kesepakatan antara Rusia dan pemerintahan Sun Yat Sen untuk mendirikan perkumpulan kaum Komunis atau yang dikenal dengan PKC.

Bahkan Sun Yat Sen mengirim utusan di bawah pimpinan Chiang Kai Shek untuk belajar organisasi dan latihan Tentara Merah di Rusia. Hingga pada tahun 1923 Chiang Kai Shek kembali ke Tiongkok bersama penasehat-penasehat Rusia seperti: Jendral Galens, Blucher, dan Michael Borodin yang akan menjadi konsultan militer KMT. Dari situlah lahirlah intelektual kiri Tiongkok seperti: Li

Li Shan, Wang Ching Wei, Li Dazhao, Chen Duxio, Ling Biao, Mao Zedong.⁶⁸ Kemudian pada tahun 1924 didukung oleh Sun Yat Sen, Chiang Kai Shek mendirikan Akademi Militer di Whampoa, dekat Kanton, untuk membangun tentara nasionalis KMT.⁶⁹ Akan tetapi, pada tanggal 12 Maret 1925 Sun Yat Sen wafat sebelum cita-citanya terwujud untuk menyatukan daratan Tiongkok di bawah pemerintahan pusat yang demokratis. Kemudian setelah wafatnya Sun Yat Sen, pimpinan partai KMT diambil alih oleh Chiang Kai Shek (<http://gec.cpu.edu.tw/ezfiles/91/1091/img/385/198026059.pdf> di akses 22 januari 2019).

Pada awal kepemimpinannya, Chiang Kai Shek bekerja sama dengan pihak Komunis untuk menghancurkan para *warlord* yang tidak bersedia tunduk pada pemerintahan pusat. Upayanya untuk menaklukan wilayah-wilayah Tiongkok terus dilakukan, hingga Chiang Kai Shek berhasil merebut dua kota besar yaitu Nanking dan Shanghai. Di Nanking inilah berdiri markas besar Chiang Kai Shek. Kerekatan hubungan KMT dan PKC mulai memudar akibat perselisihan tanah. Kaum Komunis menghendaki pembagian tanah di daerah-daerah yang telah direbutnya kepada para petani, tetapi Chiang Kai Shek menolaknya. Hal ini menimbulkan kecurigaan diantara keduanya dan saling menuduh untuk mencari keuntungan.

Pada 12 April 1927 Chiang Kai Shek berhasrat menghancurkan orang-orang komunis yang tidak bersedia tunduk pada pemerintah pusat.⁷¹ Melihat hal tersebut, Mao Zedong memperkuat diri dengan mendekati para buruh dan petani yang anti Chiang Kai Shek. Pada 1 Agustus 1927 meletus pemberontakan

Komunis di ibu kota provinsi Kiangsi, tapi pemberontakan tersebut gagal karena pasukan Komunis kalah jumlah persenjataan dan pasukan tentara. Pasukan Komunis yang masih tersisa lari ke daerah pedalaman dan pegunungan untuk melancarkan serangan balik. Chiang Kai Shek sendiri terus melakukan tindakan pembasmian terhadap Komunis untuk mengakhiri riwayat komunis.

Sementara KMT sedang sibuk melakukan penyerangan terus-menerus terhadap Komunis. Pasukan Jepang kembali berusaha menduduki Tiongkok dan berhasil merebut Nanking, ibu kota Tiongkok pada 13 Desember 1937.⁷³ Karena KMT tidak mampu menghadapi serangan Jepang. Kemudian, pihak KMT dan PKC kembali membentuk persatuan. Namun, Mao Zedong menolak berada di bawah pengaruh KMT. Mao Zedong memanfaatkan momen tersebut dengan memperkuat basis PKC dan mengontrol Pasukan Tentara Merah. Ia juga membuat strategi serangan propaganda untuk melawan KMT. Mao melakukan perjalanan *the Long March*⁷⁴ pada 16 Oktober 1934 sampai 19 Oktober 1935 agar dapat menerobos dari kepungan KMT dan terlindung dari ancaman KMT.

Agar mendapatkan dukungan rakyat Tiongkok yang sebagian besar adalah petani dibuat kebijakan *Landreform*, dengan memberikan janji kepada kaum yang tidak bertanah dan para petani untuk dapat merebut tanah dari tuan tanah, apabila mereka mau berjuang untuk kaum Komunis. Prajurit KMT yang ditangkap, tidak dibunuh dan diperlakukan buruk, tetapi mereka diberi makan, perawatan medis, dan dijejali paham-paham yang mengutuk rezim Chiang Kai Shek. Supaya mereka benci terhadap pemerintahan Chiang Kai Shek.

Akibat kekalahan pada Perang Dunia II pada 14 Agustus 1945 membuat Jepang menyerah kepada Sekutu.⁷⁷ Hal ini menandai kemenangan Tiongkok atas Jepang dalam perang Tiongkok-Jepang. Kekuasaan pemerintahan Jepang atas Taiwan juga berpindah kala itu ke Tiongkok. Penyerahan kekuasaan dilakukan oleh Jepang dengan penandatanganan Instrumen Penyerahan pada tanggal 15 Agustus 1945, dan penyerahan secara formal pada tanggal 25 Oktober 1945.⁷⁸ Penyerahan secara formal dilaksanakan oleh pemerintahan Jepang dan Pasukan Sekutu yang diwakili pemerintahan KMT dibawah Chiang Kai-Shek, yang menunjukan Jepang menyerahkan wewenang untuk memerintah Taiwan kepada Tiongkok. Setelah itu, Chiang Kai-Shek menetapkan Taiwan untuk berada di bawah pemerintah darurat militer, dengan jendral Chen Yi menjadi Gubernur di Taiwan. Akan tetapi, pasca menyerahnya Jepang kepada pihak sekutu, keadaan Tiongkok semakin memburuk. Karena KMT dan PKC saling berebut posisi di Tiongkok. Pasukan KMT yang lebih dulu menaklukan kota-kota besar, mulai

khawatir dengan Tentara Merah yang lebih dulu menguasai daerah pedesaan dan pegunungan yang sangat luas dan dengan cepat dapat menguasai daerah-daerah bekas kependudukan Jepang. Oleh karenanya, Chiang Kai Shek meminta bantuan AS untuk menyelesaikan permasalahan di Tiongkok. AS dibawah presiden Harry S. Truman mengutus Jendral George C. Marshall pada 15 Desember 1945 yang bertindak sebagai mediator persengketaan antara Nasionalis-Komunis. Namun, sepeninggal Marshall pertempuran antara KMT-PKC semakin meluas. Hingga pecahnya Perang Saudara 1945.

Komunis yang sudah menguasai Tiongkok bagian utara mulai merambah ke bagian selatan sungai Yang Tze, dan berhasil merebut markas KMT di Nanking. Kemudian, KMT memindahkan markasnya ke Kanton. Hal ini membuat Chiang Kai Shek bertindak kejam dan diktator, bahkan Ia membunuh siapapun yang tidak bersedia mendukungnya. Sedangkan PKC memanfaatkan hal tersebut untuk menarik simpati rakyat Tiongkok. Kekuasaan Komunis yang semakin meluas membuat Mao Zedong mulai mempersiapkan pembentukan Tiongkok yang dicita-citakan Komunis. Jumlah pendukung yang semakin besar membawa kemenangan pihak Komunis. PKC berhasil menyingkirkan KMT pada 1 Oktober 1949, dan memproklamasikan berdirinya Tiongkok yang beribukota di Beijing. Sedangkan Chiang Kai Shek yang mengalami kekalahan perang bersama pengikutnya lari menuju Taiwan.

Untuk berpikir tentang konsep identitas Taiwan memiliki perbedaan dengan Tiongkok daratan harus terlebih dahulu memahami dasar-dasar sejarah pulau yang penuh gejolak. Hubungan antara semua kelompok sosial yang ada di Taiwan (baik dulu maupun sekarang) telah membentuk yang unik budaya dan identitas, dan harus disajikan sebelum membahas bahasa Taiwan modern identitas sosial Taiwan dimulai dengan kelompok pribumi keturunan terutama Austronesia.

Penduduk Taiwan kebanyakan adalah etnis Han yang lahir di daratan atau memiliki leluhur disana sebelumnya. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan dialek bahasa yang mereka gunakan: Taiwan, Hakka, dan Mandarin. Taiwan juga memiliki populasi penduduk pribumi Taiwan (Gaoshan) yang berjumlah sekitar 2 persen dari total penduduk.

Kebanyakan orang di Taiwan memiliki nilai-nilai tradisional berdasarkan etika Konfusianisme ini yang berbeda dengan nilai-nilai dari Tiongkok Daratan; namun, tekanan dari industrialisasi sekarang menantang nilai-nilai ini. Beberapa nilai tradisional tetap kental dan dilestarikan, seperti penghormatan terhadap orang tua serta pemujaan kepada leluhur, penekanan kuat pada pendidikan dan pekerjaan, dan pentingnya "mianzi"-wajah. Sejak industrialisasi, kaum wanita menikmati kebebasan yang lebih besar dan status sosial yang lebih tinggi, kreativitas individu dianggap sama pentingnya karena hak-hak kesetaraan gender di Taiwan lebih baik dibanding Tiongkok daratan. (<https://www.commisceoglobal.com/resources/country-guides/taiwan-guide> diakses pada 16 Januari 2019).

4.2. HASIL PENELITIAN

4.2.1 SITUASI KEAMANAN DAN STABILITAS HUBUNGAN TIONGKOK-TAIWAN

4.2.1.1 SEBELUM KEPEMIMPINAN TSAI ING-WEN

Arah Hubungan Tiongkok Taiwan Jika melihat kembali dari sejarah, Tiongkok dan Taiwan sudah berkonflik sejak lama. Pada saat dua partai berseteru yaitu Partai Komunis Tiongkok dengan Partai Nasionalis Tiongkok di masa perang saudara, pertikaian tersebut diakhiri pada tahun 1949 dengan proklamasi berdirinya Republik Rakyat Tiongkok oleh Partai Komunis Tiongkok. Sementara Partai Nasionalis Tiongkok tidak menerima hal tersebut sehingga Tiongkok dan Taiwan sama-sama mengklaim seluruh bagian Tiongkok sebagai wilayahnya. Hubungan kedua wilayah menjadi sangat rumit. Taiwan dan Tiongkok sama-sama

menyebut diri sebagai "Tiongkok". Hingga tahun 1971, Taiwan memegang kursi perwakilan Tiongkok di PBB sebelum kalah pengaruh dari Partai Komunis di Beijing (https://www.taiwan.gov.tw/content_6.php / di akses pada 10 Januari 2019)..

AS yang sejak lama menentang pemerintahan komunis Tiongkok selama bertahun-tahun hanya membuka kantor perwakilan di Taiwan. Tetapi pada tahun 1979 saat menormalisasi hubungan dengan Beijing, Washington memindahkan kedutaan besar ke Tiongkok dan menutup perwakilan diplomatik di Taiwan. Secara teknis, Tiongkok dan Taiwan masih dianggap satu negara oleh pihak Kuomintang dan Partai Komunis. Hal yang sama juga diterapkan melalui hubungan diplomatik, atau yang dikenal dengan "Satu Tiongkok." Kebijakan ini membuat banyak negara harus memilih hubungan diplomatik, dengan Taiwan atau Tiongkok. Namun hal ini tidak menyurutkan kerja sama diplomatik walau dengan wujud lain. Biasanya, Taiwan memiliki kantor dagang dan ekonomi di negara-negara lain, yang berfungsi mirip kedutaan besar.

Dengan semakin meningkatnya hubungan politik dan keamanan, hubungan Tiongkok dan Taiwan juga telah memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 60 tahun terakhir, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Ma Ying-jeou melakukan pertemuan pada 7 November 2015 di Singapura. Negeri Singa itu dipilih karena pada saat itu di Taiwan sedang menghadapi sentimen anti-Tiongkok yang tengah menguat menjelang pemilu. Hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan pernah mencair saat Taipei di bawah kepemimpinan Ma Ying-jeou pada 2008-2016. Puncaknya saat Ma bertemu dengan Xi Jinping di

Singapura pada 2015. Saat itu pemerintahan Ma mengakui apa yang disebut "Konsensus 1992" yang mengakui "satu Tiongkok " tanpa secara spesifik menyebut Beijing atau Taipei sebagai perwakilan yang sah (<https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech-View/Article/716909/remarks-on-americas-growing-security-network-in-the-asia-pacific-council-on-for> / di akses 12 April 2019).

Tiongkok dan Taiwan memang selayaknya tidak akan pernah terpisahkan, karena kedua negara tersebut adalah saudara. Jika dilihat selama 66 tahun pembangunan dari hubungan lintas selat menunjukkan bahwa jarak waktu dan adu kekuatan dapat memungkinkan membuat kedua negara terpisah. Saat ini, perkembangan hubungan lintas selat dihadapkan dengan pilihan arah dan jalan. Pertemuan antar keduanya dapat dikatakan sebagai pertemuan bersejarah dan mungkin saja tidak akan terulang sehingga prestasi perkembangan damai hubungan lintas-selat diharapkan tidak akan hilang. Kedua negara harus mempunyai tekad besar untuk mempromosikan perdamaian dan hubungan yang berlangsung harus didasarkan pada ketulusan, kebijaksanaan dan kesabaran. Adanya pertemuan tersebut semakin menipiskan rasa kecemasan akan meledaknya konflik atau perang antara Tiongkok versus Taiwan. Ini didukung fakta meski di tataran politik Tiongkok-Taiwan bermusuhan, pada sektor ekonomi, khususnya dalam hal bisnis dan investasi, keduanya justru bisa saling bermitra mengingat sejak tahun 2002 Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar bagi Taiwan (<https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech->

View/Article/716909/remarks-on-americas-growing-security-network-in-the-asia-pacific-council-on-for / di akses 12 April 2019).

Hubungan Tiongkok dan Taiwan telah membaik presiden sebelumnya, Ma Ying-Jeou, menjabat Presiden Taiwan pada tahun 2008. Ini ditandai adanya hubungan ekonomi yang terus membaik, peningkatan hubungan pariwisata, dan kerja sama pakta perdagangan. Pada tahun 2012 Tiongkok menyambut dengan senang terpilihnya kembali Ma. Bahkan kemenangan Ma adalah pilihan yang dibuat warga Taiwan untuk lebih dekat dengan Tiongkok. Hasil pemilu tersebut meningkatkan hubungan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan merupakan keinginan umum semua orang di Taiwan. Namun seiring perkembangan justru rakyat seolah kecewa dengan kepemimpinan Ma yang cenderung menjadi dekat dan bergantung pada Tiongkok. Terbukti dengan munculnya unjuk rasa di Taiwan yang memprotes pertemuan kedua pemimpin di tahun 2015 lalu di Singapura sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat Taiwan (<http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=128941> / di akses 14 April 2019).

Sebelum terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen, Tiongkok telah berkali-kali menentang kehendak Taiwan untuk merdeka. Lebih jauh lagi, setelah kemenangan Tsai, Kantor Urusan Taiwan Tiongkok memperingatkan akan menentang setiap langkah menuju kemerdekaan Taiwan. Lemahnya pertumbuhan ekonomi Taiwan yang hanya mencapai 1 persen di tahun 2015, dan bertambahnya angka pengangguran serta stagnansi pendapatan, telah menyulut gerakan-gerakan pro kemerdekaan Taiwan lebih cepat dalam empat tahun ke depan. Belum lagi publik

Taiwan tidak merasa puas terhadap eratnya hubungan Taiwan dengan Tiongkok pada era Presiden sebelumnya yang dianggap menyebabkan ketergantungan dan menghilangkan independensi Taiwan.

4.2.1.2 SAAT KEPEMIMPINAN TSAI ING-WEN

Tsai Ing-Wen (Tsai) terpilih menjadi presiden wanita pertama Taiwan setelah berhasil memenangkan pemilihan umum (pemilu) dengan perolehan suara sebanyak 56,1%. Kemenangannya diperkirakan akan mendorong babak baru dalam upaya kemerdekaan Taiwan dari Tiongkok, dan dapat berujung pada ketidakstabilan Tiongkok. Transisi politik yang akan dilewati kedua wilayah menjadi perkembangan politik global berkaitan pada kerjasama ekonomi dan perdagangan yang telah dilakukan (<http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=128941> / di akses 14 April 2019).

Terpilihnya Tsai Ing-Wen akan mendorong babak baru dalam upaya kemerdekaan Taiwan dari Tiongkok, dan dapat berujung pada ketidakstabilan di Tiongkok. Selain itu, Pemerintah Tiongkok juga bertekad untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan ketidakpedulian akan perubahan yang mungkin terjadi di Taiwan. Namun, Pemerintah Tiongkok tidak akan pernah mengubah kebijakan untuk menentang kemerdekaan resmi Taiwan dan teguh pada satu kesatuan yaitu daratan dan Taiwan milik Tiongkok .

Negara Taiwan memasuki babak baru dengan kepemimpinan presiden perempuan yang baru terpilih. Tsai, pemimpin oposisi dari Partai Progresif Demokratik (DPP) memenangi pemilu pada 16 Januari 2016. Tsai juga menjadi presiden perempuan pertama Taiwan sejak memisahkan diri dari Tiongkok usai perang sipil Tiongkok pada 1949. Namun Tsai juga akan menghadapi tugas berat memimpin dengan ratusan misil Tiongkok mengarah ke negaranya. Tsai mengatakan ia akan menciptakan hubungan yang konsisten serta langgeng dengan Tiongkok dan tidak akan bersikap provokatif demi menjaga keadaan sekarang yang tetap (*status quo*). Kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menemukan cara yang sama-sama dapat diterima guna terus berinteraksi dengan rasa hormat dan hubungan timbal-balik untuk meyakinkan akan tidak adanya provokasi. Siapapun yang menjadi presiden Taiwan tentunya akan menentukan jalan hubungan kedua negara. Kemenangan telak yang membuat Tsai sebagai presiden perempuan pertama di Taiwan membuktikan bahwa para pemilih memalingkan dukungannya terhadap penguasa terdahulu dan partai lawan yang menjalin hubungan lebih dekat dengan Tiongkok (<http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=128941> / di akses 14 April 2019).

Arah Politik Kepemimpinan Baru Presiden Taiwan setelah Pesta demokrasi negara Taiwan telah memberikan pencerahan baru bagi perkembangan politik. Dengan naiknya Tsai sebagai calon presiden yang kemudian menyingkirkan calon dari wakil partai penguasa Kuomintang (KMT) yang bersahabat dengan Tiongkok, Eric Chu dengan perolehan suara 32,5%. Dukungan

bagi Tsai melonjak karena pemilih makin gelisah atas upaya pendekatan dengan Tiongkok yang dilakukan mantan Presiden Taiwan dari KMT Ma Ying-jeou baru-baru ini. Ma harus lengser setelah memimpin selama dua periode (delapan tahun). Akibat perekonomian stagnan, rakyat Taiwan kecewa atas penandatanganan perjanjian dagang dengan Tiongkok yang bisa mengurangi keuntungan bagi masyarakat umum di Taiwan. DPP lebih berhati-hati mendekati Tiongkok, meskipun Tsai berulang kali menyampaikan keinginannya untuk mempertahankan *status quo*.

Tsai membawa kelompok oposisi yang dipimpinnya untuk menang dan ini menjadi keunggulan bagi kelompok pro-kemerdekaan Taiwan. Banyaknya pendukung Tsai dikarenakan pihak Kuomintang dianggap terlalu dekat dengan Tiongkok sehingga mengakibatkan meningkatnya hubungan dengan Tiongkok. Para pemilih merasa tidak nyaman dengan hubungan yang terlalu dekat tersebut seiring dengan lemahnya perekonomian dan kekecewaan terhadap pakta-pakta perdagangan yang ditandatangani bersama Tiongkok, tetapi gagal memberi keuntungan bagi warga Taiwan. Dalam pidato kemenangannya, Tsai memperingatkan Tiongkok bahwa penindasan akan merugikan hubungan Taiwan dan Tiongkok (hubungan lintas selat). Ia juga menginginkan jika sistem demokrasi, jarak identitas nasional dan internasional harus dihargai. Hal ini dikarenakan penindasan dalam bentuk apa pun akan merugikan stabilitas lintas hubungan kedua negara. Sebelumnya dalam sambutannya Tsai berjanji untuk bekerja menjaga perdamaian dan stabilitas dalam hubungan dengan Tiongkok. Tapi dia menekankan apabila hubungan ke depan harus tetap mencerminkan

kehendak masyarakat. Dengan memastikan bahwa tidak ada provokasi atau peristiwa kecelakaan antar-keduanya. Diluar hubungan Tiongkok dan Taiwan, Tsai juga menyerukan kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan yang kini tengah disengketakan serta keinginan untuk memperkuat hubungan internasional dengan negara Jepang. Selain itu, Tsai berharap untuk melanjutkan komunikasi dengan Amerika Serikat (AS) yang selama ini dilakukan olehpartainya. AS memang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, tetapi sangat berguna bagi Taiwan sebagai pendukung dan pemasok senjata.

Reaksi Tiongkok terhadap Presiden Taiwan *Tsai Ing-Wen*. saat Pemilu Taiwan dipantau oleh pemerintah Tiongkok. Pantauan tersebut berakibat pada penolakan Tiongkok atas hasil pemilihan presiden Taiwan. Tiongkok mengatakan, urusan Taiwan adalah urusan internal bagi negara tersebut. Hanya ada satu Tiongkok di dunia dan pemilihan presiden di Taiwan tidak mengubah kenyataan ini termasuk pada pengakuan internasional mengenai hasil pemilu. Kemenangan Tsai dalam pemilu Taiwan direspons oleh Tiongkok dengan memberi penegasan terhadap konsensus 1992 yaitu *One China Policy*. Penegasan ini merupakan gambaran bahwa Pemerintah Tiongkok tidak bereaksi berlebihan terhadap perubahan politik di Taiwan dan tetap menginginkan *status quo*. Hal ini pun direspon positif oleh Tsai dengan menyatakan bahwa dirinya akan menjamin *status quo* hubungan Taiwan dengan Tiongkok.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan kesediaan bertemu dengan Pemimpin Tiongkok Xi Jinping untuk membahas masalah perdamaian dan stabilitas hubungan kedua pihak. "Pemerintahan kami akan bersedia melakukan

apa pun yang dapat membantu terjadinya perdamaian dan stabilitas," kata Tsai saat ditanya pada Jumat (27/4/2018) kemungkinan dirinya mempertimbangkan pertemuan dengan Xi Jinping.

Tiongkok pun telah berulang kali mendesak Tsai untuk mengambil tindakan yang sama dengan pendahulunya. Baca juga: AS Bantu Taiwan Bangun Armada Kapal Selam Beijing dalam beberapa hari terakhir juga telah meningkatkan tekanan pada pemerintahan Taiwan dengan menggelar serangkaian latihan udara dan laut di sekitar pulau. Pekan lalu, Beijing bahkan melepaskan tembakan dalam latihan yang dilangsungkan di Selat Taiwan. Pejabat Tiongkok menyebut serangkaian latihan dilakukan demi menjaga keamanan wilayah negara dan kedaulatannya, serta memperingatkan akan mengambil langkah tegas jika pasukan pro kemerdekaan Taiwan bertindak gegabah

Presiden baru Taiwan Tsai Ing-wen menyatakan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan Tiongkok. Pemerintah Tiongkok harus mengakui eksistensi negaranya sebagai negara berdaulat. Hubungan kedua negara sejak dipimpin Tsai kurang harmonis. Presiden Tsai menyatakan Tiongkok harus bisa menghadapi kenyataan terkait sistem dan pemerintahan Taiwan. Tsai menyatakan Taiwan tidak akan tunduk pada Tiongkok dan tidak juga memilih jalan konfrontasi. Tsai mengatakan Tiongkok harus segera mengadakan pembicaraan perihal pengakuan Tiongkok terhadap negara Taiwan. Tsai mengatakan pemerintahnya ingin mempertahankan status quo yang mengacu pada kondisi kawasan yang stabil dan hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok.

Hingga saat ini Tiongkok masih mengklaim Taiwan sebagai bagian dari teritorinya. Tiongkok menganggap bisa menduduki Taiwan dengan paksaan jika dibutuhkan. Sejak terpilihnya Tsai, Beijing menggunakan strategi ekonomi untuk membujuk masyarakat Taiwan bahwa unifikasi politik antar keduanya merupakan kepentingan terbaik bagi mereka. Pemerintah Tiongkok tidak puas dengan keinginan Taiwan dan menuntut Tsai untuk mendukung formulasi Tiongkok yang menganggap bahwa Taiwan termasuk negara kesatuan Tiongkok yang dianut oleh pendahulu Tsai, Ma Ying-jeou. Keengganan Tsai untuk melakukan permintaan Tiongkok bertabrakan dengan keinginan Tsai untuk memperbaharui pemahaman antar kedua negara. Walaupun pernyataan Tsai jelas namun pemerintah Tiongkok tetap akan melanjutkan apa yang selama ini menjadi kepentingannya.

Sejak terpilihnya Tsai ikut meningkatkan ketegangan antara Taiwan dan Tiongkok, karena langkah-langkah tegas Tiongkok dalam menggunakan kekuatan militer untuk menekan Taiwan. Tindakan Tiongkok direspon oleh Taiwan dengan berhubungan yang lebih hangat dengan AS. Pada bulan Januari 2017, Taiwan mengadakan latihan militer yang dimaksudkan untuk menyiapkan tentaranya jika terjadi invasi dari Tiongkok. Tsai mengatakan bahwa dia memperkuat kemampuan militer Taiwan dalam menghadapi modernisasi cepat Tiongkok. Dia mengatakan bahwa Taiwan berada “dalam keadaan siaga 24/7” untuk tanda pertama serangan Tiongkok.

Meskipun Tsai tidak mengatakannya secara spesifik, namun kemungkinan tekanan yang diberikan pada Tiongkok akan datang dari Washington. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat telah memberikan jaminan

perlindungan diam-diam terhadap Taiwan dari serangan Beijing. Di bawah Trump, hubungan antara Washington dan Taipei telah tumbuh lebih dekat dengan penjualan senjata yang diperluas dan dukungan vokal yang lebih besar dari para politisi AS. Pada tahun 2018, Trump menandatangani undang-undang Taiwan Travel Act, yang mendorong “kunjungan antara pejabat Amerika Serikat dan Taiwan di semua tingkatan.” Beberapa bulan kemudian, AS menyetujui penjualan suku cadang kapal selam ke Taiwan. Pada bulan Juni, AS membuka kedutaan *de facto* baru senilai \$255 juta di pulau itu, yang dikenal sebagai American Institute in Taiwan.

Kedamaian dan Stabilitas Untuk mempromosikan reformasi domestik yang menyeluruh, negara ini membutuhkan lingkungan eksternal yang damai dan stabil, terutama yang berkaitan dengan hubungan dengan Tiongkok. Presiden Tsai Ing-wen, sejak menjabat 20 Mei 2016, telah berupaya membangun hubungan lintas-selat yang konsisten, dapat diprediksi, dan berkelanjutan berdasarkan pada kenyataan dan fondasi politik yang ada. Posisi pemerintah yang tidak berubah adalah mempertahankan status quo lintas-selat. Ini adalah komitmen Taiwan terhadap kawasan dan dunia. Perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan di Asia adalah tanggung jawab bersama semua negara di kawasan ini. Karena itu, masalah lintas selat terhubung dengan perdamaian regional. Taiwan akan memenuhi tanggung jawabnya menjaga keamanan regional dengan terus memperluas itikad baik dan mempertahankan hubungan lintas-selat yang stabil, konsisten dan dapat diprediksi (https://www.taiwan.gov.tw/content_6.php / di akses 18 januari 2019).

4.2.2 DAMPAK POLEMIK KETEGANGAN HUBUNGAN TAIWAN-TIONGKOK

Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari Tiongkok. Semua fakta dan hukum tentang Taiwan membuktikan bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari Tiongkok wilayah. Perumusan Prinsip Satu-Tiongkok dan makna dasarnya. Di hari pendiriannya, Pemerintah Pusat Rakyat RRC menyatakan kepada pemerintah dari semua negara di dunia, "Ini pemerintah adalah satu-satunya pemerintah yang sah yang mewakili keseluruhannya rakyat Republik Rakyat Tiongkok. Sudah siap untuk didirikan hubungan diplomatik dengan semua pemerintah asing yang bersedia untuk mematuhi prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan timbal balik menghormati integritas dan kedaulatan teritorial masing-masing.

Pemilihan Tsai dan Partai Progresif Demokratik (DPP) pro-kemerdekaannya yang bersejarah pada tahun 2016, membuat ketegangan hubungan antara kedua pemerintah meningkat. Ini ditunjukkan Tiongkok dengan menempatkan tekanan diplomatik dan ekonomi yang meningkat pada Taiwan, dengan melakukan latihan tembakan langsung di laut terdekat, dan menerbangkan pesawat pembom H-6K dan pesawat pengintai di sekitar pulau Taiwan. Ketegangan hubungan Taiwan dan Tiongkok akan berdampak pada stabilitas keamanan dan secara signifikan akan berimbas pada hubungan ekonomi kedua negara. Serta terancamnya eksistensi independen, keamanan, kemakmuran, dan demokrasi taiwan apakah dapat dipertahankan atau tidak.

Peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi antara Taiwan dengan Tiongkok membawa babak baru dalam perseteruan yang telah lama terjadi di antara keduanya. Sebelum peningkatan tersebut terjadi, kebijakan reunifikasi wilayah-wilayah Tiongkok yakni *One China Policy* mendapatkan tentangan dari Taiwan. Hal ini dikarenakan langkah Tiongkok dianggap cukup keras dalam memaksa Taiwan setuju melakukan reunifikasi. Kebijakan Tiongkok dalam mengisolasi Taiwan dari dunia internasional justru semakin memicu keinginan Taiwan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Tiongkok. Akan tetapi, semenjak kebangkitan ekonomi Tiongkok, para investor asing mulai tertarik berinvestasi di Tiongkok, tidak terkecuali Taiwan. Pada tahun 2016, pemerintah Taiwan mulai menunjukkan keterbukaannya terhadap Tiongkok dengan melakukan pengurangan restriksi aktivitas perdagangan dan investasi ke Tiongkok daratan. Peningkatan volume perdagangan dan investasi antara Taiwan-Tiongkok ini berimplikasi pada kemunculan ketergantungan Taiwan terhadap Tiongkok yakni apabila memutuskan hubungan dengan Tiongkok, Taiwan akan mengalami defisit perekonomian yang sangat tinggi dikarenakan ekspor Taiwan dari 9,1% dapat meningkat menjadi 23% setelah menjalin kerjasama ekonomi secara intensif dengan Tiongkok.

Ketergantungan ekonomi ini menjadi peluang bagi Tiongkok untuk mewujudkan *One China* secara tidak langsung. Begitu banyaknya investor dari Taiwan menjadikan mereka mendukung pemerintah Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pemutusan hubungan antara Taiwan-

Tiongkok jelas akan menimbulkan kerugian besar bagi para investor Taiwan dan sekaligus akan membuat domestik Taiwan menjadi tidak stabil.

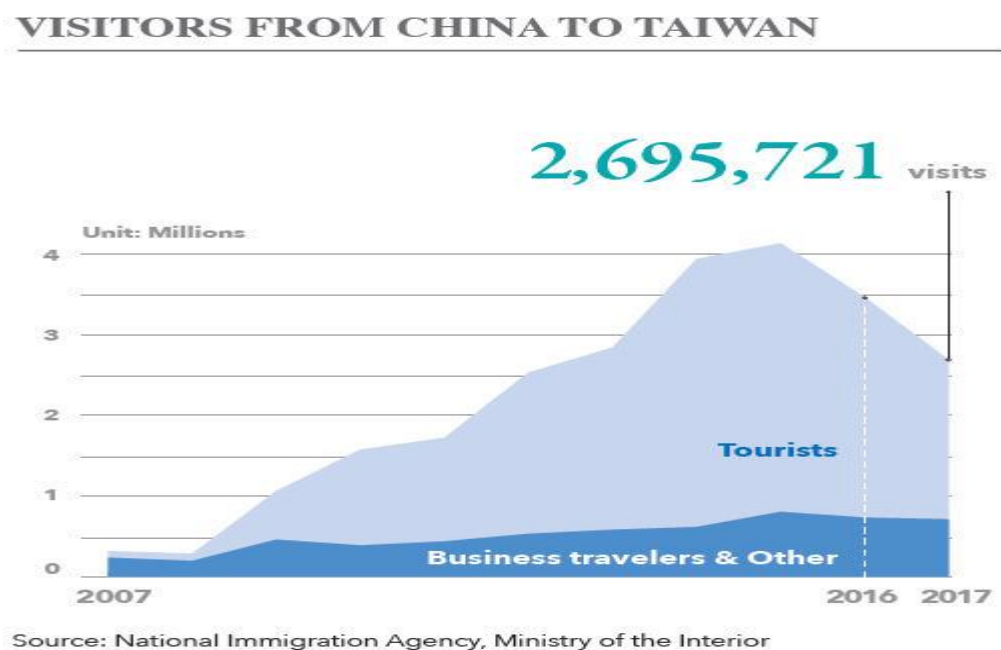
Peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi antara Taiwan dengan Tiongkok membawa babak baru dalam persetujuan yang telah lama terjadi di antara keduanya. Sebelum peningkatan tersebut terjadi, kebijakan reunifikasi wilayah-wilayah Tiongkok yakni *One China Policy* mendapatkan tentangan dari Taiwan. Hal ini dikarenakan langkah Tiongkok dianggap cukup keras dalam memaksa Taiwan setuju melakukan reunifikasi. Kebijakan Tiongkok dalam mengisolasi Taiwan dari dunia internasional justru semakin memicu keinginan Taiwan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Tiongkok. Akan tetapi, semenjak kebangkitan ekonomi Cina, para investor asing mulai tertarik berinvestasi di Tiongkok, tidak terkecuali Taiwan.

Pemerintah Taiwan saat pemerintahan Tsai mulai menunjukkan keterbukaannya terhadap Cina dengan melakukan pengurangan restriksi aktivitas perdagangan dan investasi ke Cina daratan. Peningkatan volume perdagangan dan investasi antara Taiwan-Cina ini berimplikasi pada kemunculan ketergantungan Taiwan terhadap Cina yakni apabila memutuskan hubungan dengan Cina, Taiwan akan mengalami defisit perekonomian yang sangat tinggi dikarenakan ekspor Taiwan dari 9,1% dapat meningkat menjadi 23% setelah menjalin kerjasama ekonomi secara intensif dengan Tiongkok.

Ketergantungan ekonomi ini menjadi peluang bagi Tiongkok untuk mewujudkan *One China* secara tidak langsung. Begitu banyaknya investor dari Taiwan menjadikan mereka mendukung pemerintah Tiongkok untuk

mendapatkan keuntungan ekonomi. Pemutusan hubungan antara Taiwan-Tiongkok jelas akan menimbulkan kerugian besar bagi para investor Taiwan dan sekaligus akan membuat domestik Taiwan menjadi tidak stabil. Maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa semakin Taiwan bergantung pada Tiongkok secara ekonomi, maka semakin sulit upaya Taiwan untuk mendapatkan kedaulatannya, dan semakin tinggi pula keberhasilan Tiongkok dalam mewujudkan *One China* dalam kekuasaan Republik Rakyat Tiongkok (<https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2178192/shanghai-and-taipei-rebuild-city-city-ccross-strait-ties-after> / diakses pada 12 Feb 2019).

Ganbar 4.3



4.2.3 PERAN NEGARA LAIN DALAM MEMPENGARUHI *CROSS-STRAIT RELATIONS* TIONGKOK TAIWAN

Hasil dari pemilihan presiden di Taiwan tidak mengubah fakta dan konsensus masyarakat internasional. Pemerintah Tiongkok sangat berharap dunia internasional mengambil langkah-langkah nyata untuk mendukung pengembangan damai hubungan lintas Selat Taiwan. Selain itu, Tiongkok perlu menghargai demokrasi di Taiwan. Hal ini sebagai penegasan untuk dapat memastikan bahwa kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menemukan cara-cara yang dapat diterima bagi stabilitas keamanan kawasan. Kemenangan Tsai memang telah berhasil menuliskan sejarah baru bagi Taiwan, tetapi dari kemenangan itulah Tiongkok justru melihat dapat memicu eskalasi dalam hubungan kedua negara.

Rakyat berpendapat bahwa tidak mungkin Tsai melakukan perbuatan untuk memprovokasi Beijing jika dia memenangi pemilu. Hubungan keduanya akan menjadi rumit dan tidak bisa diprediksi. Mereka akan memperburuk beberapa pencapaian, namun pada saat yang sama kepentingan Beijing mempertahankan Taiwan tergantung secara ekonomi dan upaya masing-masing pihak untuk tetap menjaga perdamaian. Taiwan membutuhkan perubahan ekonomi dan politik. Bagi Tsai, masa depan Taiwan bukan Tiongkok, tetapi dunia. Dengan menjadi presiden, Tsai akan didorong masuk ke dalam salah satu pekerjaan paling sulit dan berbahaya di Asia. Tsai pun harus mampu menyeimbangkan kepentingan antara negara adidaya Tiongkok, yang juga mitra dagang terbesar Taiwan, dengan AS sebagai rujukan kebebasan dan tempat demokratis.

Situasi hubungan Tiongkok Taiwan meningkat sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing wen. Kedua pihak Taiwan maupun Tiongkok sama-sama mencari dukungan internasional terkait hubungan keduanya.

Presiden Taiwan Tsaing Ing-wen memberi peringatan kepada dunia tentang agresi dan hegemoni Tiongkok. Beijing telah menempatkan tekanan diplomatik dan ekonomi yang meningkat pada Taiwan, melakukan latihan tembakan langsung di laut terdekat, dan menerbangkan pesawat pengebom H-6K dan pesawat pengintai di sekitar pulau tersebut. Taiwan percaya ini bukan hanya masalah Taiwan yang diserang, tetapi cerminan kesediaan Tiongkok untuk menggunakan kekuatan untuk kebijakan ekspansionisnya. Dan dapat menjadi ancaman internasional (<https://www.thechinastory.org/yearbooks/yearbook-2012/cross-straits-relations/> di akses 11 januari 2019).

Begitupun dengan Pemerintah Tiongkok sangat berharap dunia internasional mengambil langkah-langkah nyata untuk mendukung pengembangan damai hubungan lintas Selat Taiwan. Akan tetapi banyak masyarakat internasional lebih memilih untuk tidak mencampuri urusan domestik Tiongkok, apalagi dengan Politik internasional Tiongkok “One China Policy” sehingga banyak negara hanya memiliki hubungan ekonomi perdagangan dengan Taiwan dan tidak memiliki hubungan politik (<https://www.thechinastory.org/yearbooks/yearbook-2012/cross-straits-relations/> di akses 11 januari 2019).

Penjualan senjata oleh Amerika Serikat kepada Taiwan merupakan salah satu driving force untuk memahami hubungan Tiongkok-AS. Di bawah kerangka

perjanjian *Taiwan Relations Act*, Amerika Serikat berhak untuk menyediakan persenjataan untuk tujuan pertahanan nasional bagi Taiwan. Hal ini dilakukan AS untuk melindungi Taiwan dari kemungkinan tindakan unilateral Tiongkok. Kebijakan AS ini sangat mempengaruhi Tiongkok, yang menganggap bahwa Taiwan merupakan salah satu propinsi yang memberontak dari Tanah Air. Bagi Tiongkok, status Taiwan telah final dan tidak dapat dirubah, yaitu merupakan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok, dan tidak akan pernah memperoleh kemerdekaan secara de jure. Sehingga kebijakan AS menjual persenjataan dalam jumlah besar, seperti yang terjadi pada tahun 2010, dipandang oleh Tiongkok sebagai dukungan untuk kemerdekaan Taiwan (Vernando, 1995:263).

Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas militer Amerika Serikat merupakan variabel utama mengapa strategi Tiongkok dalam merespon penjualan senjata ke Taiwan bersifat defensif. Saat ini pilihan yang menguntungkan bagi Tiongkok adalah bertahan, bukannya menyerang. Pilihan untuk memaksa penyatuan dengan Taiwan hanya akan merugikan Tiongkok, karena akan memancing reaksi AS, seperti yang terjadi pada krisis tahun 1995-1996. Kapabilitas militer Tiongkok yang berada di bawah AS, menjadi pertimbangan utama strategi defensif.

Hubungan di antara AS dan Tiongkok dapat kita bagi menjadi empat bagian/periode: 1950-1970, 1971-1977, 1978-1988, dan 1988-2009. Pada periode 1950-1970, hubungan AS- Tiongkok masih tegang karena dipengaruhi oleh Perang Korea, namun relatif tidak mengalami fluktuasi. Menginjak periode kedua, hubungan keduanya berada pada titik tolak menuju normalisasi hubungan – yang

ditunjang oleh membaiknya hubungan Tiongkok dengan AS, karena sengketa batas wilayah dengan Uni Soviet pada tahun 1969. Periode ketiga merupakan periode normalisasi yang ditandai dengan dibukanya kembali hubungan diplomatik pada tanggal 1 Januari 1979. Periode ke empat, yang ditandai oleh peristiwa Tiannanmen pada tahun 1989, mengantarkan AS-Tiongkok pada pola hubungan paling fluktuatif (Bush, 2004:124).

Memasuki abad 21, transfer persenjataan tidak berhenti. Pemerintahan Obama menyetujui rencana penjualan senjata ke Taiwan sebesar 6,4 milyar dolar AS. Jumlah itu terdiri dari 114 misil Patriot sebesar 2, 81 milyar dolar, 60 helikopter Black Hawk senilai 3,1 milyar dolar dan selebihnya (340 juta dolar) peralatan komunikasi untuk pesawat F-16 pesanan Taiwan. Penjualan senjata ke Taiwan tersebut mencederai Joint Communique 1982 yang berisi tentang pengurangan penjualan senjata ke Taiwan. Beijing tidak merespon kebijakan tersebut secara koersif, seperti yang terjadi pada tahun 1996. Meski begitu pemerintah Tiongkok tetap melayangkan protes keras kepada pemerintah AS menerapkan sanksi terhadap perusahaan persenjataan AS dan menambah misi jarak jauh di selat Taiwan.

Bagi Tiongkok, Taiwan memiliki arti yang sangat penting dan strategis, sehingga kepentingan untuk reunifikasi tidak dapat ditawar lagi. Kehilangan Taiwan akan memberikan implikasi yang mendalam dan cukup kompleks bagi Tiongkok. Deklarasi kemerdekaan oleh Taiwan dianggap setara dengan deklarasi perang. Jika pemerintah Tiongkok gagal mempertahankan Taiwan, maka hal itu akan memicu pemberontakan serupa di Tibet, Xinjiang dan beberapa tempat

lainnya. Bagi para elit Tiongkok, lepasnya Taiwan berarti kelemahan Tiongkok, sedangkan bersatunya Taiwan berarti kekuatan Tiongkok.. Perasaan serupa tidak hanya ditunjukkan oleh para elit dan juga akademisi tetapi juga muncul di kalangan masyarakat Tiongkok Daratan, yang menganggap kebangkitan Tiongkok tidak nyata dan tidak akan ada artinya, jika pemerintah gagal menyatukan kembali Taiwan dengan Tiongkok. Ambisi Tiongkok untuk merangkul kembali Taiwan terhambat oleh kehadiran AS. *Mindset* Perang Dingin tetap dihidupkan oleh AS dengan terus menyuplai persenjataan kepada Taiwan dalam jumlah besar. Hal itu dilakukan AS untuk menangkai perilaku agresif Tiongkok dalam upaya melakukan reunifikasi dengan Taiwan. Sino-American Mutual Defense Treaty yang telah dijalin oleh AS-Taiwan semenjak 1954 digantikan oleh Taiwan Relations Act (TRA) pada tahun 1979. Melalui TRA ini AS tetap dapat menjalin hubungan non-formal dengan Taiwan, seperti hubungan perdagangan, kebudayaan dan hubungan non-formal lainnya (Ross, 2002:27).

Dalam artikelnya yang berjudul *Kehidupan setelah Pax Americana*, Charles Kupchan meyakini bahwa salah satu faktor penentu stabilitas di kawasan Asia Timur adalah Taiwan. Hal itu disebabkan oleh masih hidupnya mindset Perang Dingin Amerika Serikat, dengan terus menggunakan Taiwan sebagai alat untuk mengecek perkembangan Tiongkok. Strategi deterens AS tersebut memicu strategi deterens tandingan dari Tiongkok dengan terus melakukan modernisasi militernya. Jika tidak dimaintain dengan baik, maka akan semakin meningkatkan tensi hubungan, baik di antara AS-Tiongkok, maupun kawasan Asia Timur dan Tenggara secara umum.

4.2.4 LANGKAH-LANGKAH MEREDAKAN KETEGANGAN

4.2.4.1 LANGKAH-LANGKAH TAIWAN

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyatakan Tiongkok harus menerima status Taiwan sebagai pulau yang berpemerintahan sendiri. Dalam pidato Tahun Baru dari kantornya, Presiden Tsai mengatakan Tiongkok harus “menghormati desakan 23 juta orang untuk kebebasan dan demokrasi,” dan agar kedua pihak menghadapi kenyataan bahwa ada perbedaan mendasar antara “nilai-nilai dan gaya hidup” serta sistem politik mereka. Hubungan antara Beijing dan Taipei telah tegang sejak Tsai, pemimpin Partai Progresif Demokratik yang prokemerdekaan, mulai menjabat pada tahun 2016 dan menolak untuk menerima konsep Tiongkok dan Taiwan bergabung sebagai satu Tiongkok.

Beijing telah meningkatkan sikap agresifnya terhadap pulau berpemerintahan sendiri itu, dengan melancarkan latihan-latihan militer di Selat Taiwan, menghambat partisipasi Taipei dalam berbagai organisasi internasional, dan membujuk beberapa negara agar mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok.

Presiden Tsai meminta Tiongkok agar mengupayakan cara-cara “damai” dalam menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Pernyataan Tsai disampaikan sehari sebelum Presiden Tiongkok Xi Jinping dijadwalkan berpidato untuk memperingati 40 tahun pidato bersejarah “Pesan untuk Rekan-Rekan Senegara di Taiwan” yang pada akhirnya mendorong hubungan diplomatik antara kedua pihak yang saling bersaing itu.

Selama dua tahun terakhir, Tsai secara konsisten bersiteguh untuk melindungi cara hidup yang bebas dan demokratis bagi 23 juta penduduk; menjaga pembangunan berkelanjutan ROC; serta mempertahankan perdamaian lintas selat dan stabilitas regional. Ini adalah kesamaan terbesar di antara masyarakat Taiwan, dan setiap politisi serta partai politik bertanggung jawab untuk mempertahankan hal ini sampai akhir (https://www.taiwan.gov.tw/content_3.php / di akses 24 januari 2019).

Masyarakat Taiwan tidak akan pernah menerima upaya yang dilakukan pihak luar untuk secara sepihak mengubah status quo di Selat Taiwan. Dan komunitas internasional tidak akan pernah menyetujui atau mendukung tindakan apapun yang melanggar nilai-nilai universal. Saya menyerukan kepada pihak berwenang di Beijing, negara besar yang bertanggung jawab, seharusnya memainkan peran positif secara regional dan internasional, bukan menjadi sumber konflik.

Sebagai presiden, saya ingin menegaskan bahwa kami tidak akan bertindak gegabah untuk meningkatkan konfrontasi, juga tidak akan menyerah. Saya tidak akan terprovokasi untuk mengambil langkah yang menuju kepada petikaian atau konflik yang membahayakan hubungan lintas selat, juga tidak akan menyimpang dari kehendak rakyat, dan mengorbankan kedaulatan Taiwan. Sebaliknya, kami akan merespons dengan mengupayakan "Stabilitas, Adaptasi, dan Kemajuan". Walaupun jalan di depan kita penuh tantangan, namun kita harus menjalaninya dengan langkah tegas dan pasti. Oleh karena itu, saat ini tugas kita yang paling penting adalah memperkuat keamanan nasional, ekonomi, dan jaring

pengaman sosial. Kami akan terus memperkuat Taiwan, dan menjadikannya tak tergantung dalam komunitas global. Ini adalah cara utama bagi Taiwan untuk bertahan secara berkelanjutan (<https://id.taiwantoday.tw/news.php?unit=463&post=143119> / di akses 19 januari 2019).

1. Poin penting pertama dalam memperkuat keamanan nasional kita adalah memperkuat hubungan diplomatik berbasis nilai, dan menetapkan pentingnya strategi "Taiwan yang Tak Tergantikan". Taiwan menempati posisi geostrategis yang sangat penting. Dalam menghadapi perubahan keadaan secara global, pilihan strategis kami sangat jelas, yaitu untuk mempertahankan kebebasan, demokrasi, dan ekonomi pasar secara teguh. Nilai-nilai fundamental ini telah menjadi fondasi penting dalam membantu Taiwan menjadi model demokrasi Asia dan mengembangkan ekonomi yang kuat. Dalam menghadapi tekanan dari Tiongkok, kami telah dengan teguh menjunjung tinggi nilai-nilai serta keyakinan kami, dan hal ini telah menghasilkan dukungan dari negara-negara sepaham.
2. Poin kedua untuk memperkuat keamanan nasional kita adalah dengan meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Pertahanan yang kokoh dan deterensi multi-domain adalah strategi militer kita, yang intinya terletak pada peningkatan kemampuan militer ROC.

3. Yang ketiga adalah mencegah kekuatan asing menginfiltrasi dan merusak masyarakat kita, serta memastikan bahwa institusi demokratis dan ekonomi sosial kita berfungsi secara normal. Kami bertekad untuk mempertahankan keberagaman nilai-nilai demokrasi Taiwan. Tetapi jika ada negara lain yang mengambil keuntungan dari kebebasan masyarakat Taiwan untuk menyusup dan menciptakan kekacauan, kita tidak akan duduk diam, dan akan mengambil segala tindakan pencegahan yang diperlukan.
4. Yang keempat adalah menyesuaikan dan mengatur ulang strategi ekonomi dan perdagangan global. Untuk menanggapi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, serta restrukturisasi besar-besaran terhadap tatanan ekonomi dan perdagangan global, kita harus menyesuaikan peran Taiwan dalam pembangunan regional dan rantai pasokan global. Kami akan menggunakan kemampuan usaha (bisnis) menengah dan besar Taiwan untuk mengintegrasikan pembagian kerja secara regional dan jangkauan global yang mereka miliki, ditambah dinamisme usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mengembangkan penyebaran strategi baru sebagai katalis untuk sepenuhnya mengubah dan meningkatkan ekonomi Taiwan.

Untuk mewujudkan 4 poin di atas, ada 3 hal penting yang harus kita kerjakan (<https://id.taiwantoday.tw/news.php?unit=463&post=143119> / di akses 19 januari 2019) :

1. Pertama, dari sudut pandang struktur industri dan komplementaritas sumber daya, kita harus membangun hubungan erat di bidang pembagian kerja industri dan keterhubungan teknis dengan negara industri maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, dalam aspek riset dan pengembangan (R&D) serta teknologi manufaktur mutakhir untuk menciptakan rantai pasokan baru dengan efisiensi yang tinggi.
2. Kedua, dalam hal sumber daya dan pembagian pasar, kita perlu menciptakan rantai industri yang menjadi kunci dalam mendukung pembangunan ekonomi, mata pencaharian masyarakat serta kesejahteraan melalui kerjasama yang beragam dengan negara-negara mitra Kebijakan Baru Arah Selatan (New Southbound Policy, NSP) dan pasar berkembang lainnya yang memiliki potensi. Hal ini akan mendorong kemakmuran bersama dan pembangunan ekonomi.
3. Ketiga, bekerja sama dengan pemerintah negara sahabat diplomatik untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, menemukan peluang pengembangan baru, membangun fondasi untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan membuka pasar baru, basis produksi baru, dan pangkalan operasi global untuk Taiwan di masa depan.

Pendekatan yang Konsisten Pemerintah taiwan akan terus membahas hubungan lintas selat berdasarkan fakta historis dari perundingan 1992, Konstitusi ROC, Undang-Undang yang Mengatur Hubungan Antara Rakyat Daerah Taiwan dan Wilayah Daratan, dan kehendak rakyat.

Selain itu, pemerintah Taiwan menyerukan kepada otoritas Tiongkok untuk menghadapi kenyataan bahwa ROC ada dan bahwa rakyat Taiwan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap sistem demokrasi. Kedua sisi selat harus duduk dan berbicara sesegera mungkin. Apa pun bisa dimasukkan untuk diskusi, asalkan kondusif bagi pengembangan perdamaian lintas selat dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan dan fleksibilitas, serta sikap tenang, dapat memajukan hadiah yang terbagi menuju masa depan yang saling menguntungkan (https://www.taiwan.gov.tw/content_6.php / di akses 22 januari 2019).

4.2.4.2 LANGKAH-LANGKAH TIONGKOK

Walaupun secara hubungan politik dan kemanann Taiwan dan tiongkok meningkat. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi hubungan ekonomi antar keduanya. Dapat dilihat dri Peningkatan volume perdagangan dan investasi antara Taiwan-Tiongkok ini berimplikasi pada kemunculan ketergantungan Taiwan terhadap Tiongkok yakni apabila memutuskan hubungan dengan Tiongkok, Taiwan akan mengalami defisit perekonomian yang sangat tinggi dikarenakan ekspor Taiwan dari 9,1% dapat meningkat menjadi 23% setelah menjalin kerjasama ekonomi secara intensif dengan Tiongkok.

Ketergantungan ekonomi ini menjadi peluang bagi Tiongkok untuk mewujudkan *One China* secara tidak langsung. Begitu banyaknya investor dari Taiwan menjadikan mereka mendukung pemerintah Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pemutusan hubungan antara Taiwan-Tiongkok jelas akan menimbulkan kerugian besar bagi para investor Taiwan dan sekaligus akan membuat domestik Taiwan menjadi tidak stabil. Maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa semakin Taiwan bergantung pada Tiongkok secara ekonomi, maka semakin sulit upaya Taiwan untuk mendapatkan kedaulatannya, dan semakin tinggi pula keberhasilan Tiongkok dalam mewujudkan *One China* dalam kekuasaan Republik Rakyat Tiongkok.